



UNDANG PARPOL PERCEPAT BANPOL Golkar dan PPP Dapat Jatah Dobel

YOGYA (KR) - Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) Kota Yogya mulai memproses pencairan dana bantuan keuangan untuk partai politik atau banpol. Dari delapan partai yang berhak mendapatkan banpol, ada dua partai yang bakal memperoleh double, yakni Partai Golkar dan PPP.

Menurut Kasubag Tata Usaha (TU) Kantor Kesbang Kota Yogya Widiastuti, pihaknya sudah mengundang unsur parpol untuk mempercepat pencairan banpol. "Selasa (6/9) kemarin semua parpol peraih kursi di DPRD Kota Yogya kami undang. Sekarang sudah berproses pemberkasan, harapannya bisa segera cair," ungkapnya, Rabu (7/9).

Dari sisi teknis atau persyaratan, hampir semua parpol sudah lengkap. Hanya, pihaknya belum bisa menjamin akhir pekan ini sudah bisa dicairkan. Pasalnya, seluruh mekanisme pencairan dana hibah maupun bantuan sosial, sangat bergantung dari Bendahara Pemkot atau

Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogya.

Oleh karena itu, Kantor Kesbang hanya melakukan proses administrasi. Salah satunya memastikan semua persyaratan mampu terpenuhi, terutama pertanggung jawaban penggunaan dana banpol tahun sebelumnya. "Kalau administrasi semua sudah lengkap. BPK RI juga sudah menyelesaikan auditnya. Hanya Partai Golkar dan PPP sedang kami konsultasikan ke pusat," imbuhnya.

Kedua partai tersebut tahun lalu tidak berhak mendapatkan banpol lantaran masih berkonflik secara internal. Namun seiring terbitnya surat edaran dari Kementerian Hukum dan HAM, maka tahun ini bisa dicairkan sekaligus jatah untuk tahun lalu. Tetapi, khusus jatah untuk tahun sebelumnya baru akan dicairkan melalui APBD Perubahan 2016.

Sedangkan besaran dana yang akan diterima parpol peraih kursi di DPRD dihitung berdasarkan jumlah suara pada

Pileg terakhir. Tiap suara dikalikan Rp 3.446 sehingga semakin besar suara yang diperoleh, maka dana bantuan juga semakin banyak.

PDIP selaku peraih kursi terbanyak sekaligus partai pemenang memperoleh bantuan terbesar mencapai Rp 266 juta. Disusul oleh PAN Rp 106,6 juta, Gerindra Rp 92,9 juta, PPP Rp 72,6 juta, PKS Rp 64 juta, Golkar Rp 61,2 juta, Demokrat Rp 44,9 juta dan NasDem Rp 27,1 juta.

Sementara Ketua DPC Partai NasDem Kota Yogya Sigit Wicaksono mengaku, pihaknya masih merencanakan pemanfaatan alokasi tersebut. Pasalnya, sesuai aturan 40 persen harus dipergunakan untuk keperluan perkantoran dan 60 persen pendidikan politik. Padahal dana yang bakal ia terima tergolong minim yakni Rp 27,1 juta. "Dana itu harus saya bagi untuk empat belas kecamatan. Belum tahu nanti teknisnya seperti apa karena pasti belum mampu mencukupi kebutuhan," akunya. **(Dhi)-k**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kantor Kesatuan Bangsa	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005